

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang: Studi Kasus Objek Wisata Candi Gedong Songo, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hubungan dan peran *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Candi Gedong Songo telah terbentuk melalui keterlibatan beberapa aktor utama, yaitu pemerintah, lembaga pengelola cagar budaya, Perum Perhutani, sektor pendukung, masyarakat lokal, paguyuban, serta media promosi. Berdasarkan teori peran *stakeholder*, para aktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam lima peran, yaitu *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator*. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya (MCB) Kementerian Kebudayaan, dan Perum Perhutani berperan sebagai *policy creator* karena memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengelolaan, dan pelestarian kawasan. Dinas Pariwisata juga menjalankan fungsi *coordinator* dalam menjembatani kepentingan antarinstansi dan masyarakat lokal. Sektor pendukung seperti perbankan dan pelaku usaha berperan sebagai *facilitator* melalui dukungan fasilitas, transaksi digital, dan pengembangan atraksi pendukung. Sementara itu, paguyuban pedagang, juru parkir, penyewaan kuda, fotografer, dan jasa wisata lainnya berperan sebagai *implementor* karena

terlibat langsung dalam pelayanan wisata di lapangan. Adapun fungsi accelerator dijalankan melalui promosi digital dan kegiatan komunitas yang membantu memperluas informasi destinasi kepada masyarakat.

2. Meskipun pembagian peran *stakeholder* sudah terlihat kolaborasi dalam pengembangan Candi Gedong Songo belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh karakter kawasan yang bersifat multitoritas, yaitu melibatkan aset Pemerintah Kabupaten Semarang, kawasan cagar budaya yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kebudayaan, serta kawasan hutan yang berkaitan dengan Perum Perhutani. Kondisi tersebut membuat pengembangan destinasi sangat bergantung pada kesepakatan, koordinasi, dan pembagian kewenangan yang jelas. Salah satu persoalan penting yang ditemukan adalah belum optimalnya perpanjangan MoU pembagian hasil retribusi pemanfaatan kawasan, terutama berkaitan dengan pembagian hasil retribusi. Dengan demikian, hubungan antarstakeholder sudah berjalan secara formal, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, komunikasi, transparansi, dan penyelesaian kepentingan antaraktor.
3. Faktor pendukung kolaborasi antarstakeholder dalam pengembangan Candi Gedong Songo meliputi adanya kesamaan tujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kawasan wisata, keberadaan regulasi serta kerja sama antarinstansi, dan komitmen dalam mendukung pengembangan destinasi. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.

4. Faktor penghambat kolaborasi antarstakeholder masih ditemukan pada aspek komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Komunikasi antaraktor belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan, kepercayaan antarstakeholder masih perlu diperkuat terutama terkait kewenangan dan pengelolaan kawasan, serta kompleksitas kebijakan akibat keterlibatan beberapa institusi menyebabkan proses pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas wisata belum berjalan secara optimal.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang: Studi Kasus Objek Wisata Candi Gedong Songo, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Adapun saran yang diberikan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kelembagaan dan kejelasan peran antarstakeholder Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan, serta Perum Perhutani KPH Kedu Utara perlu memperkuat koordinasi kelembagaan melalui forum bersama yang berjalan secara rutin, terjadwal, dan memiliki agenda kerja yang jelas. Forum tersebut perlu diarahkan untuk membahas isu strategis, seperti perpanjangan MoU pemanfaatan kawasan, pembagian hasil retribusi, pembagian kewenangan, pengembangan fasilitas, pelestarian cagar budaya, konservasi kawasan hutan, serta evaluasi layanan wisata. Penguatan ini penting karena pengembangan Candi Gedong Songo tidak berada dalam satu kewenangan tunggal, melainkan

melibatkan beberapa aktor dengan dasar hukum, kepentingan, dan ruang kerja yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan antarstakeholder perlu diperjelas melalui pembagian peran yang lebih tegas, mekanisme komunikasi yang berkelanjutan, dan kesepakatan kerja sama yang transparan. Dengan adanya koordinasi yang lebih terstruktur, setiap *stakeholder* dapat menjalankan perannya secara lebih selaras, sehingga pengembangan destinasi tidak berjalan sektoral dan tidak bergantung hanya pada satu aktor utama.

## 2. Peningkatan kualitas pengelolaan destinasi berbasis pelayanan, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat lokal

Pengembangan Candi Gedong Songo perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan tanpa mengabaikan pelestarian cagar budaya, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi masyarakat lokal. Dinas Pariwisata bersama *stakeholder* terkait perlu menyusun standar pelayanan yang lebih jelas bagi aktor lapangan, terutama paguyuban pedagang, jasa kuda, jasa foto, jasa payung, penyewaan tikar, dan juru parkir. Standar tersebut dapat mencakup ketertiban tarif, keamanan barang pengunjung, kebersihan kawasan, keramahan pelayanan, pengelolaan keluhan wisatawan, dan penataan aktivitas ekonomi lokal. Museum dan Cagar Budaya perlu memperkuat informasi edukatif mengenai nilai sejarah Candi Gedong Songo, sedangkan Perhutani perlu memastikan aktivitas wisata tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Sektor pendukung seperti perbankan dan pelaku usaha wisata juga dapat diarahkan untuk memperkuat fasilitas, digitalisasi transaksi, promosi, dan

peningkatan kapasitas pelaku lokal. Dengan demikian, pengembangan Candi Gedong Songo tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan dan pendapatan, tetapi juga pada mutu layanan, pelestarian kawasan, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat sekitar.